



KEBIJAKAN INVESTASI DI KABUPATEN BATUBARA

Oleh

Pinondang Nainggolan

Fakultas Ekonomi Dan Pasca Sarjana Universitas Simalungun

Email: pinondangnainggolan@gmail.com

Article History:

Received: 01-06-2021

Revised: 16-07-2021

Accepted: 28-07-2021

Keywords:

Kebijakan

Investasi

Kabupaten Batubara

Abstract: Tujuan pelaksanaan Bimbingan Teknis ini adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) terutama kepada pelaku usaha untuk mendorong pengembangan penanaman modal (investasi) di Kabupaten Batu Bara. Kabupaten Batu Bara merupakan merupakan tujuan investasi terbesar kedua di Sumatera Utara setelah kota Medan, baik investasi dalam negeri (PMDN) maupun investasi asing (PMA). Ada enam sektor unggulan sebagai penyumbang PDRB di Kabupaten Batu Bara dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk di kembangkan sebagai tujuan investasi, yaitu sektor industri pengolahan (PT. Inalum, industri pengolah minyak sawit-CPO), sektor pertanian (perkebunan sawit, perikanan tangkapan laut), sektor perdagangan besar, perdagangan kecil dan reperasi mobil, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor pariwisata. Ke enam sektor unggulan ini merupakan sektor hulu yang dapat mendorong sektor hilir untuk dimanfaatkan UMKM sebagai sumber pendapatan dan lapangan pekerjaan. Untuk tujuan itu, kepada peserta UMKM diarahkan, di ajak untuk menangkap peluang usaha untu menanamkan modal (berinvestasi). Untuk itu perlu adanya kebijakan pemerintah daerah penanaman modal nasional, yaitu: 1. Layanan perizinan penanaman modal (investasi) yang cepat yaitu 3 jam (paket ekonomi jilid II) bagi investor dan tidak hannya untuk investor di kawasan industri tetapi juga untuk indutri menengah kecil (UMKM). 2. Percepatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penerbitan tax allowance (pengurangan pajak penghasilan) demi untuk mendorong investor menanamkan modalnya (Paket Ekonomi jilid II), 3. Penyederhanaan perizinan pembelian lahan untuk investasi tanpa merugikan masyarakat (Paket Ekonomi Jilid III). 4. Penerapan fasilitas investasi meliputi fasilitas fiskal dan non fiskal. 5. Penerbitan PERDA oleh eksekutif bersama legislative untuk mendorong kegiatan penanaman modal (investasi) dan pelayanan perizinan dalam rangka menghadapi MEA. 6. Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi, berintegritas.



moral serta visi yang baik. 7. Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) tentang ketegakerjaan dengan memprioritaskan penduduk (angkatan kerja) di Kabupaten Batu Bara sesuai dengan kompetensinya tanpa menghalangi tenaga kerja dari luar daerah/luar negeri. 8. Penyediaan infrastruktur pendukung investasi. 9. Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) yang mengatur penggunaan lahan investasi tanpa menggeser keberadaan masyarakat. 10. Kerjasama investasi antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, swasta dengan swasta, serta pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota

PENDAHULUAN

Penanaman modal atau Investasi merupakan komponen kedua dalam penentuan pendapatan nasional dari sisi pengeluaran agregat (*aggregate expenditure*) dimana. Penanaman modal atau investasi diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam prekonomian (Sukirno, 2005).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara (termasuk daerah/wilayah) adalah tergantung kepada jumlah penanaman modal (investasi) yang tertanam di negara/darah tersebut. Todaro (2006) salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara adalah akumulasi modal. Semakin besar penanaman modal (investasi) di suatu negara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara itu akan pesat yang sekaligus membantu pemerintah menyediakan lapangan kerja baru. Akan tetapi anggaran pemerintah relatif terbatas dan tidak cukup untuk membiayai seluruh pembangunan sehingga mengharapkan kehadiran investasi swasta dalam negeri dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun investasi asing dalam bentuk Penanaman modal asing (PMA). Atas dasar itu setiap negara/daerah berusaha untuk mendatangkan investasi baik investasi dalam negeri (PMDN) yang terdiri investasi pemerintah dan investasi swasta, maupun investasi asing (PMA) guna mendorong pembangunan dan pertumbuhan di negara/daerah.

Upaya untuk membentuk iklim yang menggairahkan investasi di Indonesia, adalah menerapkan berbagai peraturan mengenai investasi, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 tentang PMA, UU nomor 6 tahun 1968 tentang PMDN, UU RI No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan akan perlindungan hukum, penyederhanaan dalam perizinan dalam penanaman modal untuk PMDN dan PMA.

Kabupaten Batu Bara merupakan tujuan investasi yang sangat potensial dan merupakan urutan kedua di Sumatera Utara setelah kota Medan dalam realisasi PMDN. Periode januari - maret 2020 realisasi investasi PMDN sebesar Rp.590.249,30 juta atau 14,88 % dari total PMDN Sumatera Utara. Sedangkan untuk penanaman modal asing (PMA), Kabupaten Batu bara menempati urutan ke tujuh di Sumatera Utara dengan realisasi PMA sebesar Rp.4.057,92 juta atau hanya 0,077 % dari total PMA Sumatera



Utara. Melihat potensi sumber daya di Kabupaten Batu Bara yang cukup besar dalam berbagai sektor sebenarnya baik PMDN maupun PMA masih tergolong rendah sehingga dimasa mendatang diharapkan akan meningkat demi peningkatan pendapatan daerah PDRB maupun PAD.

**REALISASI INVESTASI PMDN PERIODE JANUARI S/D MARET 2020
BERDASARKAN KAB/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

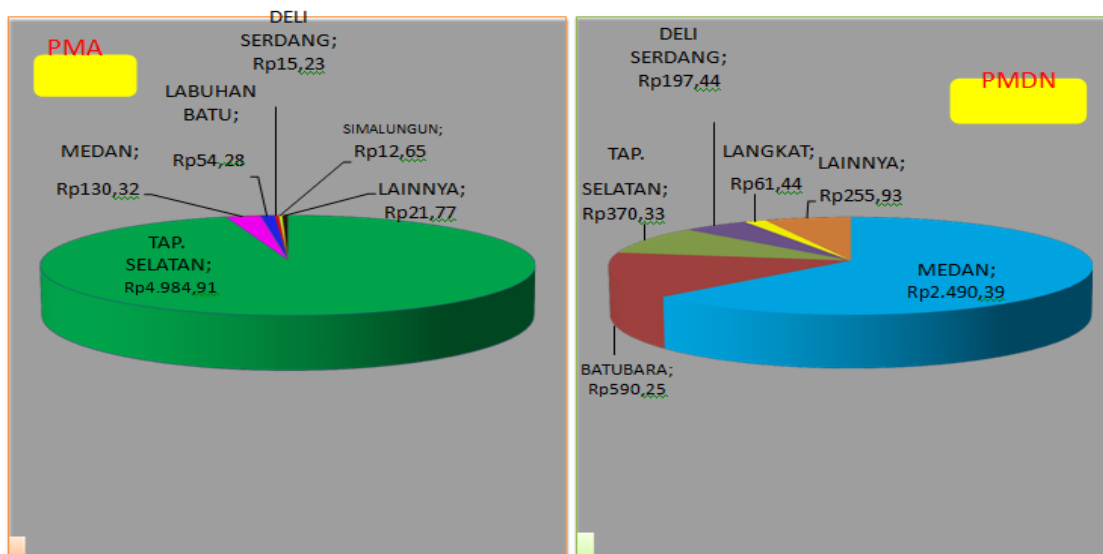
NO	KAB/KOTA	INVESTASI (Rp. JUTA)	NO	KAB/KOTA	INVESTASI (Rp. JUTA)
1	MEDAN	2.490.390,80	17	ASAHAN	415,10
2	BATUBARA	590.249,30	18	HUMBAHAS	428,70
3	TAP. SELATAN	370.328,70	19	KARO	108,80
4	DELI SERDANG	197.440,20	20	TEBING TINGGI	177,60
5	LANGKAT	61.438,80			
6	PADANG LAWAS UTARA	52.988,20		JUMLAH	3.965.776,70
7	MADINA	49.182,30			
8	TAP. TENGAH	35.706,10			
9	BINJAI	35.138,30			
10	SIMALUNGUN	22.407,40			
11	PADANG LAWAS	19.238,90			
12	LABUHAN BATU	15.970,70			
13	GUNUNG SITOLI	15.010,10			
14	PAKPAK BARAT	6.493,10			
15	LABUHAN BATU SELATAN	1.565,40			
16	TAP. UTARA	1.098,20			

**REALISASI INVESTASI PMA PERIODE JANUARI S/D MARET 2020
BERDASARKAN KAB/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	KAB/KOTA	INVESTASI (Rp. JU IA)
1	TAP. SELATAN	4.984.910,21
2	MEDAN	130.320,01
3	LABUHAN BATU	54.277,92
4	DELI SERDANG	15.225,12
5	SIMALUNGUN	12.647,52
6	TAP. UTARA	5.008,32
7	BATUBARA	4.057,92
8	LANGKAT	4.949,28
9	LABUHAN BATU SELATAN	2.593,44
10	ASAHAN	1.926,72
11	DAIRI	1.298,88
12	KARO	783,36
13	PAKPAK BARAT	545,76
14	TOBASA	360,00
15	BINJAI	123,84
16	MADINA	89,28
17	PSIANTAR	33,12
	JUMLAH	5.219.150,70



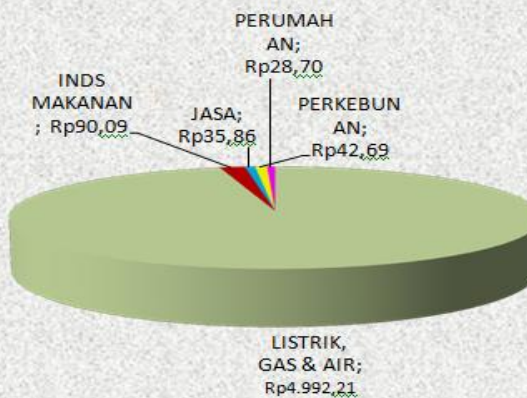
GRAFIK 5 BESAR PMA/PMDN
KAB/KOTA

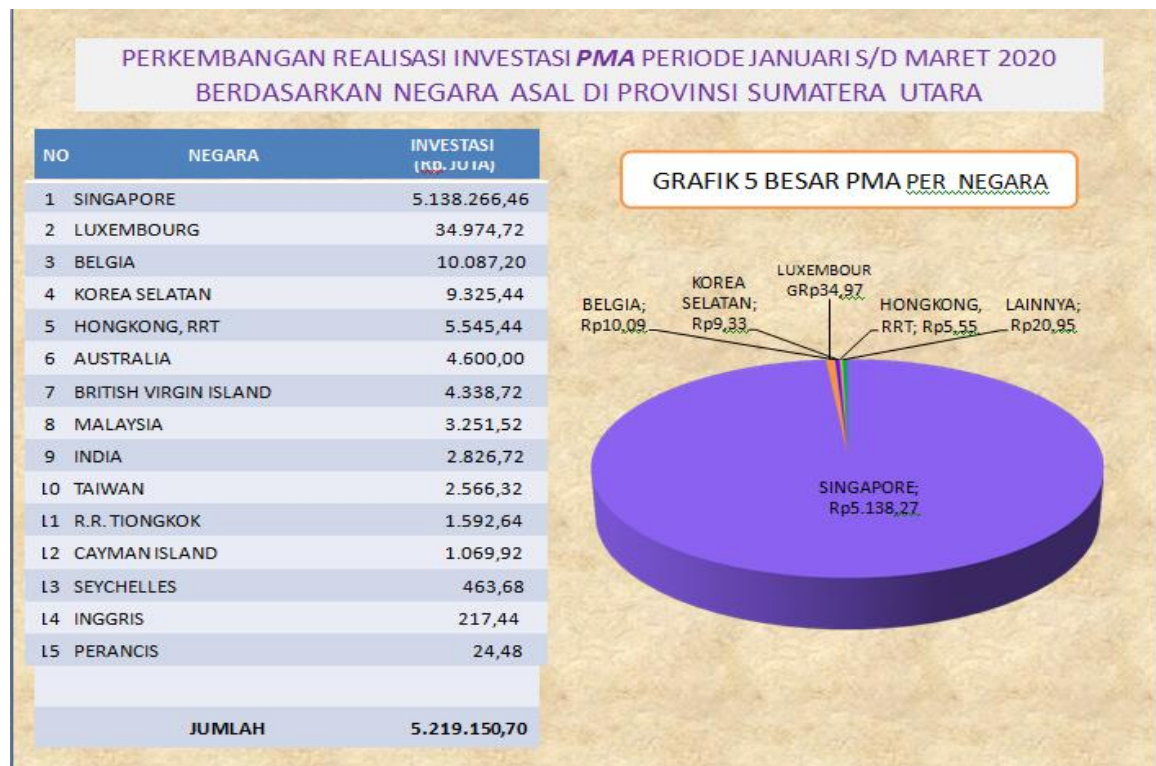
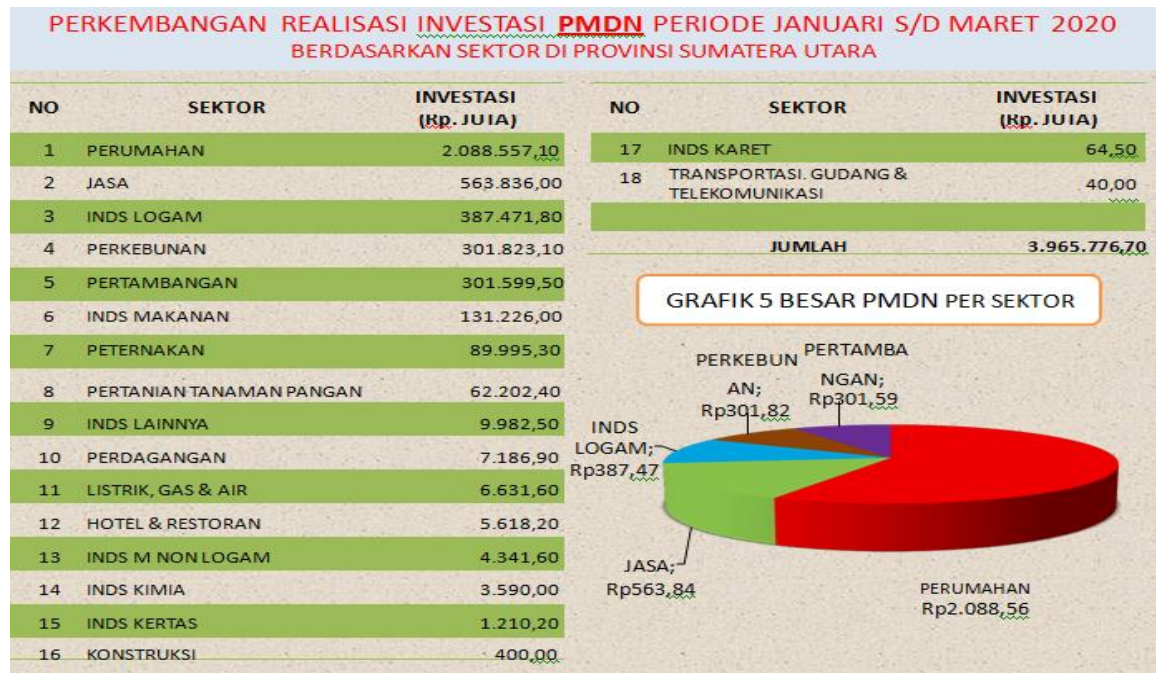


PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI **PMA** PERIODE JANUARI S/D MARET 2020
BERDASARKAN SEKTOR DI PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	SEKTOR	INVESTASI (Rp. JUMLAH)
1	LISTRIK, GAS & AIR	4.992.212,45
2	INDS MAKANAN	90.090,73
3	JASA	35.855,28
4	PERKEBUNAN	42.686,64
5	PERUMAHAN	28.704,96
6	PERDAGANGAN	16.427,52
7	TRANSPORTASI, GUDANG & TELEKOMUNIKASI	4.057,92
8	HOTEL & RESTORAN	3.443,04
9	INDS KAYU	2.560,32
10	INDS KIMIA	1.069,92
11	PERTANIAN TANAMAN PANGAN	895,68
12	INDS LAINNYA	558,72
13	INDS LOGAM	468,00
14	PETERNAKAN	119,52
JUMLAH		5.219.150,70

GRAFIK 5 BESAR PMA PER SEKTOR





LANDASAN TEORI

Teori Investasi (Penanaman modal) dan Kriteria Investasi.

Mankiw (2007), investasi adalah tambahan bersih terhadap stok capital (modal) yang ada (*net additional to existing capital stock*). Selanjutnya menurut Mankiw ada tiga jenis pengeluaran investasi, yaitu (1) investasi tetap bisnis (*bussines fixed investment*), mencakup



peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi guna menghasilkan produk, (2) investasi residensial (*residential investmen*) mencakup rumah baru untuk tempat tinggal dan untuk disewakan, (3) investasi persediaan (*inventori investment*) mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan.

Investasi juga terbagi atas investasi otonom (*autonomous investment*) dan investasi terdorong (*induced investment*). Investasi otonom adalah investasi yang terjadi untuk mendorong permintaan total, dimana $\Delta I \rightarrow \Delta Y \rightarrow \Delta D \rightarrow \Delta C$. Sedangkan investasi terdorong (*induced Investment*) adalah investasi akibat adanya kenaikan permintaan total, dimana: $\Delta D \rightarrow \Delta C \rightarrow \Delta I \rightarrow \Delta Y$

Besar kecil nya investasi (penanam modal) ditentukan banyak faktor, yaitu (Sukirno, 2005):

- a. Tingkat keuntungan investasi
- b. Tingkat bunga
- c. Ramalan keadaan perekonomian dimasa mendatang
- d. Kemajuan teknologi
- e. Tingkat pendapatan nasional
- f. Keuntungan yang diperoleh perusahaan.

J.M.Keynes (Sukirno,2005), permintaan modal didekati dengan konsep marginal kapital (*marginal efficiency of capital* atau MEC), yaitu tingkat perolehan bersih yang diharapkan atas pengeluaran modal. MEC dapat juga diartikan sebagai aliran pendapatan yang diharapkan dimasa datang dari sejumlah biaya atau modal yang ditanamkan sekarang. Teori Neo-Klasik mengatakan bahwa berapa besar modal yang digunakan dalam kegiatan produksi adalah dengan membandingkan tambahan produksi modal (*marginal product of capital, MPk*) dengan biaya sewa modal (*cost of capital atau rental cost, RC*). Jadi investasi dilakukan apabila $MPk > RC$, (Nainggolan, 2015).

Ada beberapa aspek dalam penilaian proyek, ialah : 1. Aspek teknis; 2. Aspek managerial dan administratif; 3. Aspek organisasi; 4. Aspek komersial; 5. Aspek finansial, dan 6. Aspek ekonomi (Simanjuntak, 2005). Selanjutnya layak atau tidak layaknya investasi atau penanaman modal dapat diketahui melalui 5 kriteria, yaitu Gross Benefit/Cost Ratio, Net Benefit/Cost Ratio, Profitability Ratio, Net Present Value, dan Internal Rate of Return (IRR).

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan kontemporer (Todaro, 2006) bahwa pertumbuhan output nasional (Y) dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu akumulasi modal (K), pertumbuhan penduduk (L) dan kemajuan teknologi (T), ditulis dengan model : $Y = f(K, L, T)$. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi untuk pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi diarahkan pada 3 hal, yaitu: (a) kemajuan teknologi netral (*neutral technological progress*), yaitu kemajuan teknologi yang sebanding dengan pertambahan modal dengan pertambahan tenaga kerja, diterapkan di negara sebanding kemajuan teknologi dengan perkembangan penduduk; (b) kemajuan teknologi yang menghemat tenaga kerja (*Labor saving technological progress*) yaitu kemajuan teknologi yang menghemat tenaga kerja. Hal ini merupakan tujuan kemajuan teknologi dan diterapkan di negara maju; (c) kemajuan teknologi yang menghemat modal (*capital saving technological progress*), yaitu kemajuan teknologi yang masih menggunakan banyak tenaga kerja, hal ini cocok diterapkan pada negara yang jumlah penduduk cukup banyak (negara sedang berkembang, seperti Indonesia). Selanjutnya,Teori

Keynes (Sukirno, 2005), bahwa pertumbuhan ekonomi dilihat sisi pengeluaran agregat (*aggregate expenditure*), dimana output nasional dan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi pengeluaran konsumsi (C), ditambah pengeluaran investasi (I), ditambah pengeluaran pemerintah (G) ditambah pengeluaran ekspor (X) dikurangi impor (M), atau : $Y = C + I + G + (X - M)$.

HASIL

1. Gambaran Umum dan Potensi Kabupaten Batu Bara.

Kabupaten Batu Bara salah satu Kabupaten yang tergolong muda di Sumatera Utara mempunyai luas 904,96 Km² terdiri dari 12 Kecamatan, 1.099 dusun, 141 desa dan 10 kelurahan. Jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 416.493 orang dengan jumlah rumah tangga 95.497 rumah tangga.



Potensi ekonomi Kabupaten Batu Bara yang merupakan sektor basis atau sektor unggulan (*leading sector*), adalah sektor industri pengolahan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor konstruksi; dan sektor transportasi dan pergudangan.

a. Sektor industri pengolahan

Industri pengolahan merupakan sektor basis yang mengolah berbagai sumber daya alam menjadi barang jadi maupun setengah jadi guna meningkatkan nilai tambah (*value added*) seperti industri pengolahan buah sawit menjadi CPO, KPO, industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, Industri pengolahan aluminium yang bahan baku bauxit pada PT. Inalum, Tbk maupun industri pengolahan lainnya.

PT. Inalum, Tbk yang memproduksi memproduksi aluminium terbaik di dunia merupakan industri hulu yang dapat mendorong pertumbuhan industri hilir yang dengan memanfaatkan kemajuan dari PT. Inalum, Tbk, sehingga memberikan kontribusi ganda



terhadap PDRB dan kesempatan kerja.

Besarnya kontribusi sektor industri pengolahan dalam pembentukan PDRB menempati urutan teratas yaitu Rp. 15.961,45 milyar tahun 2020. Jumlah ini terus meningkat sejak tahun 2015. Melihat potensi yang cukup besar dalam pengembangan sektor industri di daerah ini maka penanaman modal (investasi) PMDN maupun PMA dalam bentuk peralatan industry baru hasil teknologi yang lebih modern yang dapat mengolah bahan baku dengan lebih efisien. Kemajuan dalam sektor industri pengolahan membawa dampak terhadap sektor lain seperti transportasi, perdagangan, pertanian serta sektor lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.



Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan.

Sektor ini baik pertanian rakyat, perkebunan maupun perikanan cukup potensial di daerah ini, sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB yaitu sebesar Rp. 6.827,21 pada tahun 2020 dan meningkat setiap tahun sejak tahun 2015. Perkebunan sawit yang cukup luas untuk menghasilkan CPO dan KPO yang merupakan bahan baku berbagai macam industry (seperti bahan baku industri di kawasan KEK Sei Mangkei) sebagai perdagangan besar daerah ini. Begitu juga dengan perikanan terutama ikan laut yang cukup potensial di daerah ini karena berbatasan dengan laut. Produksi ikan laut cukup besar yang menjadi sumber penghasilan masyarakat disekitar pantai. Untuk mendukung kelancaran perdagangan ikan maka pelabuhan Tanjung Tiram dan kota Tanjung tiram perlu dibenahi sebagai sebagai pusat pasar perdagangan ikan yang akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Batu Bara . Sektor ini mempunyai potensi besar untuk dikembangkan melalui peningkatan investasi (PMDN dan PMA). Bentuk investasi pertanian yaitu peralatan pertanian yang lebih modern seperti traktor pengolah tanah dengan cepat, mesin memanen, perluasan areal pertanian. Sedangkan sub sektor perikanan, penanaman modal berupa alat tangkap ikan yang lebih modern, Kapal/perahu nelayan yang lebih baik. Guna mendukung ke di sektor pertanian dan perikanan perlu dibangun

pelabuhan darat (*dry port*) dengan peralatan yang baik. Perkembangan pada sektor ini dapat mendorong perkembangan sektor lain seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor transportasi maupun sektor lainnya, yang menampung banyak tenaga kerja dan peningkatan pendapatan daerah.



Sektor perdagangan besar dan eceran, retribusi mobil dan sepeda motor.

Kabupaten Batu Bara merupakan daerah strategis dan strategis untuk yang terhubung dengan Kabupaten lainnya dan didukung infrastruktur jalan yang semakin baik sehingga memperlancar arus mobilitas perdagangan barang. Kehadiran Jalan Tol yang sedang dibangun, nantinya akan semakin memperlancar perdagangan besar. Pedagang eceran juga cukup potensial untuk dikembangkan di daerah ini, seiring dengan pertambahan penduduk yang bekerja di berbagai sektor. Pedagang eceran yang menjual makanan maupun hasil kerajinan harus dibuat lebih istimewa untuk menarik para masyarakat sebagai konsumen, dan adanya kebijakan untuk setiap produk masyarakat seperti hasil industri makanan dan kerajinan dapat dipasarkan melalui pasar swalayan. Aktivitas ekonomi menggunakan alat transportasi kendaraan mobil maupun sepeda motor mengharuskan semakin pesatnya sektor retribusi mobil dan sepeda motor yang menjadi sumber penghasilan masyarakat. Tahun 2020 kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, retribusi mobil dan sepeda motor menempati urutan ketiga yaitu sebesar Rp. 6.282, 87 milyar.



Dimasa mendatang sektor perdagangan besar, pedagang eceran, reperasi mobil dan sepeda motor akan semakin besar seiring dengan kemajuan sektor lain, sehingga kebutuhan penanaman modal disektor ini juga cukup potensial untuk dikembangkan

Sektor konstruksi

Merupakan potensi yang sangat besar yang dilihat dari semakin pesatnya pembangunan perumahan maupun pembangunan tempat usaha, hal ini sejalan dengan perkembangan penduduk dan yang tinggal di daerah ini, dan juga pesatnya pembangunan industri, kemajuan sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor lain. Tahun 2020 kontribusi sektor konstruksi terhadap PDRB Kabupaten Batu Bara menempati urutan ke empat, yaitu sebesar Rp.2.497,86 milyar. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2020, namun sejak tahun 2015 sumbangan sektor konstruksi terus meningkat hingga tahun 2019. Untuk masa datang sektor akan semakin pesat lagi seiring dengan kebutuhan rumah dan bangunan tempat usaha yang semakin pesat, sehingga sangat potensial untuk penanaman modal (investasi) baik PMDN maupun PMA, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan kesempatan kerja.

Sektor transportasi dan pergudangan

Kelancaran kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi sektor transportasi untuk mengangkut bahan baku dan hasil produksi. Di Kabupaten Batu Bara sektor transportasi sangat mendukung aktivitas ekonomi serta mempunyai potensi yang cukup besar untuk mengangkut hasil industri pengolahan, hasil pertanian dan perikanan baik untuk dalam negeri maupun luar negeri, serta mobilitas penduduk dari dan keluar daerah ini. Begitu juga dengan pergudangan begitu penting untuk menyimpan sementara barang barang sebelum diangkut dengan alat transportasi. Jasa pemakaian gudang menjadi sumber pendapatan daerah baik masyarakat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh, pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan terbesar di Asia dalam transportasi laut akan membutuhkan gudang yang semakin banyak dan semakin luas. Kebutuhan akan gudang akan semakin besar seiring dengan perkembangan sektor industri, perdagangan, pertanian dan perikanan, konstruksi dan sektor lainnya.

Sektor transportasi dan pergudangan mempunyai dampak eksternalitas terhadap sektor lain terutama peningkatan pendapatan daerah dan penampung tenaga kerja yang cukup banyak, oleh karenanya sektor ini sebagai sasaran penanaman modal (investasi) mempunyai peluang besar. Begitu pula dengan pelabuhan Tanjung Tiram sebagai pelabuhan transportasi hasil laut perlu didukung oleh tersedianya gudang untuk penyimpanan sementara produksi ikan laut. Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB menempati urutan ke lima yaitu sebesar Rp. 1.186,70 milyar.

Sektor Pariwisata

Meskipun dalam perhitungan PDRB maupun PDB sektor pariwisata tidak tersendiri sebagai salah satu sektor karena dianggap sudah melekat pada berbagai sektor yang lain, namun sektor ini sangat potensial di Kabupaten Batu Bara. Objek wisata yang ada Kabupaten Batu Bara terdiri tujuh objek yaitu : (1) Istana lima laras berupa bangunan istana di Kecamatan Tanjung Tiram, (2) pulau salah nama berupa pulau dan pantai di Kecamatan Tanjung Tiram, (3) pulau pandan berupa pulau dan pantai di Kecamatan Tanjung Tiram, (4) pantai bunga berupa pantai di Kecamatan Tanjung Tiram, (5) pantai sejarah berupa pantai di Kecamatan Lima Puluh, (6) pantai wisata alam datuk berupa pantai di Kecamatan Sei Suka, dan (7) pantai perjuangan berupa pantai di Kecamatan Sei Suka.



Ke tujuh objek wisata ini hingga saat ini belum terkelola dengan baik meskipun jumlah pengunjung kesana sudah mulai banyak seperti pulau pandan dan pulau salah nama. Ketersediaan penginapan maupun restoran disekitar objek wisata belum tersedia dengan memadai dan alat transportasi masih menggunakan kapal yang sederhana sehingga kunjungan wisata ke lokasi wisata ini masih terbatas. Penanaman modal dalam bentuk hotel dan restoran serta alat pengangkutan adalah sangat cocok di lokasi ini yang menjadi sumber penghasilan investor, masyarakat, dan pemerintah, yang sekaligus perluasan lapangan kerja. Begitu pula lokasi wisata yang lainnya masih kurang dikenal dan belum tertata dengan baik sehingga kunjungan wisata masih minim, pada haljikan di lakukan penataan akan menjadi sumber penghasilan masyarakat dan pemerintah daerah.

Sektor-Sektor lain (selain ke lima sektor unggulan)

Sektor-sektor lain selain ke enam sektor yang diuraikan diatas, juga cukup penting karena saling mendukung keberadaan ke lima sektor unggulan. Meskipun kontribusinya terhadap PDRB relatif lebih sedikit, namun tanpa sektor maka ke lima sektor unggulan tidak dapat berkembang, seperti sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor informasi dankomunikasi, kesehatan, pendidikan dan lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Harga Berlaku tahun 2015-2020 (milyar Rupiah)

Kategori/Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4 993,58	5 326,22	5 750,42	6 085,37	6 394,84	6 827,21
B. Pertambangan dan Penggalian	29,94	34,95	40,55	44,23	48,04	48,51
C. Industri Pengolahan	12 344,33	13 230,20	14 013,48	15 078,15	15 785,80	15 961,45
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11,45	12,16	13,94	15,33	16,71	17,63
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,03	9,22	10,04	10,24	10,93	10,95
F. Konstruksi	1 425,45	1 724,96	2 103,38	2 302,77	2 530,92	2 497,86
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4 070,13	4 516,46	4 928,07	5 354,81	5 953,18	6 282,87
H. Transportasi dan Pegudangan	994,82	1 035,24	1 086,86	1 143,32	1 200,58	1 186,70
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	302,63	334,01	361,77	386,59	418,74	395,27
J. Informasi dan Komunikasi	109,62	121,14	132,98	143,24	156,35	170,92
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	82,73	89,47	93,88	99,47	102,13	101,85
L. Real Estate	300,29	331,26	376,47	408,01	439,63	461,28
M, N. Jasa Keuangan	25,54	28,61	31,01	33,50	37,13	39,08
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	494,94	538,69	573,80	609,15	667,47	687,44
P. Jasa Pendidikan	107,54	117,83	124,59	132,93	145,27	153,05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72,41	79,53	87,12	94,86	106,68	111,33
	21,90	24,64	27,51	30,02	33,46	34,23
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	25 395,32	27 554,61	29 756,87	31 972,00	34 047,85	34 987,64



Kebijakan Penanaman Modal Di Kabupaten Batu Bara

Penanaman modal (investasi) di Kabupaten Batu Bara menjadi salah satu alternative untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka mensejahterakan rakyat dan sekaligus penyediaan lapangan kerja. Untuk itu, perlu dibuat kebijakan pemerintah daerah yang selaras kebijakan penanaman modal nasional, yaitu:

1. Layanan perizinan penanaman modal (investasi) yang cepat yaitu 3 jam (paket ekonomi jilid II) bagi investor dan tidak hanya untuk investor di kawasan industri tetapi juga untuk industri menengah kecil (UMKM).
2. Percepatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penerbitan tax allowance (pengurangan pajak penghasilan) demi untuk mendorong investor menanamkan modalnya (Paket Ekonomi jilid II)
3. Penyederhanaan perizinan pembelian lahan untuk investasi tanpa merugikan masyarakat (Paket Ekonomi Jilid III).
4. Penerapan fasilitas investasi meliputi fasilitas fiskal dan non fiskal.

Fasilitas fiskal yaitu:

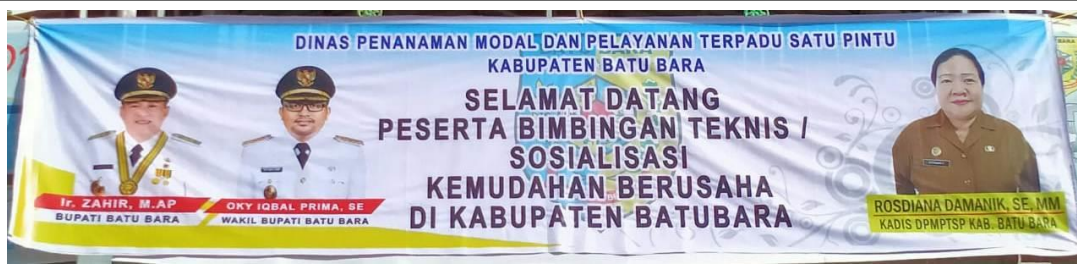
- pembebasan bea impor mesin yang dipakai untuk kegiatan produksi, bukan mesin untuk diperjual belikan.
- pembebasan bea impor bahan produksi
- rekomendasi tax allowance dan tax holiday dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Fasilitas non fiskal berupa ijin untuk mengimpor mesin dan barang untuk keperluan produksi maupun untuk diperjual belikan.

5. Penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) oleh badan eksekutif bersama legislative untuk mendorong kegiatan penanaman modal (investasi) dan pelayanan perizinan dalam rangka menghadapi kebebasan arus investasi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) di kabupaten Batu Bara.
6. Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompensi, berintegritas, moral serta visi yang baik.
7. Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) tentang ketegakerjaan dengan memprioritaskan penduduk (angkatan kerja) di Kabupaten Batu Bara sesuai dengan kompetensinya tanpa menghalangi tenaga kerja dari luar daerah/luar negeri.
8. Penyediaan infrastruktur pendukung investasi
9. Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) yang mengatur penggunaan lahan investasi tanpa menggeser keberadaan masyarakat.
10. Kerjasama investasi antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, swasta dengan swasta, serta pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam kaitannya dengan Penanaman Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan, pelaksanaan evaluasi, pelaksanaan administrasi, tentang pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu.

Berikut adalah foto-foto kegiatan:





KESIMPULAN

1. Sektor basis atau sektor unggulan (*leading sector*) di Kabupaten Batu Bara, ada lima sektor yaitu sektor industri pengolahan; sektor pertanian kehutanan dan perikanan; sektor perdagangan besar dan eceran, reperasi mobil dan sepeda motor; sektor konstruksi; dan sektor sektor transportasi dan pergudangan. Sektor-sektor basis ini sekaligus menjadi industry hulu yang dapat memacu pertumbuhan industri hilir, serta mendorong kemajuan sektor lainnya.
2. Sektor wisata yang bearada tujuh lokasi wisata,masih merupakan potensial, dan belum dikelola dengan baik.

Implikasi Kebijakan.

1. Sektor basis atau sektor unggulan perlu dikembangkan dengan cara penanaman modal baik PMDN maupun PMA sehingga akan mencapai kapasitas yang lebih besar dalam peningkatan pendapatan masyarakat maupun PDRB.
2. Kemajuan pada sektor basis/sektor ungggulan yang sekaligus merupakan industri hulu perlu dicermati masyarakat sebagai peluang untuk penanaman modal bagi pengembangan indutri hilir.



3. Sektor pariwisata yang belum dikelola dengan baik dan belum tersentuh para investor agar diberikan kesempatan untuk mengelolanya baik pengusaha lokal (PMDN) maupun luar negeri (PMA) dengan mempertimbangkan kelestarian alam maupun budaya.
4. Perlu di ciptakan PERDA tentang penanaman modal di daerah tentang kesempatan kerja penduduk sekitar dan hak privat yang tidak bertentangan dengan UU RI tentang penanaman modal.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Batubara Tahun 2020.
- [2] Badan Pusat Statistik Sumatera Utara dalam Angka Tahun 2020.
- [3] Ibrahim, H. M. Yacob. 2009. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [4] Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- [5] Nainggolan, Pinondang. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Penentu Investasi Swasta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Di Sumatera Utara*. Medan. Universitas Sumatera Utara. Disertasi.
- [6] Simanjutak, Payaman J. 2000. *Pengantar Evaluasi Proyek*. Jakarta: Liberty.
- [7] Sukirno, Sadono. 2015. *Makroekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- [8] Sutojo, Siswanto, 2002., *Studi Kelayakan Proyek, Konsep, Teknik & Kasus*, PT.Damar Mulya Pustaka



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN